

# **KAJIAN EKONOMI SULAWESI SELATAN**



## **SIMULASI DAMPAK COVID-19 DAN PROSPEK KARANTINA WILAYAH**

**TIM LOGOV CELEBES**

**MARET 2020**

Sejak kasus pertama pandemi COVID-19 menghantam Indonesia pada 2 Maret 2020 di kota Depok, jumlah kasus positif virus corona di Indonesia per 30 Maret 2020 telah mencapai angka 1.414 orang. Kondisi ini semakin parah dikarenakan Indonesia juga termasuk sebagai negara dengan tingkat kematian tertinggi, yaitu 122 orang, sementara pasien sembuh masih 75 orang. Selain DKI Jakarta sebagai provinsi dengan tingkat penyebaran tertinggi, Sulsel juga dilaporkan sebagai daerah yang terjangkit cukup tinggi, dimana data per 30 Maret 2020 di Sulsel tercatat sudah ada 50 orang dinyatakan positif terjangkit COVID-19, 46 diantaranya masih dirawat dan 4 orang telah meninggal. Sampai saat ini, belum terdapat satupun pasien dinyatakan sembuh/diperbolehkan pulang. Pelajaran penting yang dapat kita catat dari awal munculnya infeksi COVID-19 di Indonesia adalah bagaimana pentingnya daya tanggap pemerintah dalam merespon pandemi ini secara serius dan cepat.

Secara konseptual, pandemi COVID-19 mengganggu perekonomian negara melalui dua sisi yaitu permintaan dan penawaran, atau dikenal dengan istilah *supply-demand doom loop* (Fornano dan Wolf, 2020). Dari sisi penawaran, penyebaran COVID-19 dapat mengganggu aktivitas produksi dan berpotensi mendorong tingkat pengangguran, sementara di sisi lain tingkat harga barang dan jasa mengalami kenaikan karena tingginya permintaan (mengarah pada *panic buying*) kebutuhan pokok selama pandemi berlangsung. Inflasi yang diperkirakan tinggi selama pandemi dan diikuti dengan hilangnya sumber pendapatan membuat perekonomian sisi permintaan akan terganggu. Penurunan permintaan barang dan jasa akibat dari tingginya inflasi dan penurunan pendapatan akan direspon oleh produsen dengan menurunkan kuantitas produksi barang dan jasa sehingga berakibat turunnya pendapatan perusahaan dan kemudian diikuti dengan penurunan pendapatan pekerja. Jika pandemi berlangsung lama, maka gelombang PHK akan terjadi secara besar-besaran, ratusan ribu hingga jutaan pekerja akan terancam kehilangan pekerjaan.

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, penerapan kebijakan *social distancing* oleh pemerintah daerah Sulsel dalam memitigasi dampak ekonomi pandemi COVID-19 diperkirakan akan menciptakan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 sebesar **4,61 persen**. Angka ini menurun dibandingkan pertumbuhan ekonomi Sulsel tahun 2019 yang tercatat sebesar 6,92 persen. Sementara itu, jika diproyeksi dalam keadaan tanpa adanya pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi Sulsel tahun 2020 diperkirakan sebesar 6,6 persen. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dalam keadaan normal tersebut, Sulsel berpeluang mendapatkan PDRB riil sebesar Rp352,4 Triliun. Namun demikian, proyeksi pertumbuhan ekonomi Sulsel tahun 2020 pada angka 4,61 persen dengan peluang PDRB riil sebesar **Rp345,9 Triliun** menunjukkan bahwa terdapat perkiraan peluang ekonomi yang hilang pada tahun 2020 sebesar **Rp6,5 Triliun**.

## Prospek Kebijakan Karantina Wilayah

Salah satu alternatif kebijakan yang banyak diusulkan oleh publik yaitu dilakukannya karantina wilayah (*lockdown*). Meskipun demikian, usulan tersebut belum banyak didasarkan pada perhitungan atau simulasi ekonomi yang jelas. Secara umum, kebijakan karantina wilayah perlu mempertimbangkan setidaknya dua hal. *Pertama*, berapa peluang ekonomi yang hilang. Hal ini didasarkan pada berhentinya aktivitas produksi pada sektor tertentu dan adanya pelambatan pada aktivitas konsumsi, yang mana berimplikasi pada adanya nilai PDRB yang hilang dan menurunnya penerimaan daerah. *Kedua*, biaya mitigasi yang diperlukan. Dalam hal ini, untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pelayanan kesehatan selama masa karantina. Implikasi dari kebutuhan *cash transfer* menunjukkan pentingnya mengukur kapasitas fiskal pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, melalui skema karantina wilayah di Sulsel selama 1 (satu) bulan, diperkirakan pertumbuhan ekonomi Sulsel tahun 2020 akan berada di angka **5,05 persen**. Hasil ini menunjukkan efek yang lebih baik dibandingkan pendekatan *social distancing* yang diperkirakan hanya menciptakan pertumbuhan ekonomi Sulsel tahun 2020 sebesar 4,61 persen. Jika dilihat dari angka proyeksi PDRB riil Sulsel, skema karantina wilayah diperkirakan dapat mencatat **Rp347,3 Triliun** PDRB riil di tahun 2020. Dengan kata lain, perkiraan nilai peluang ekonomi Sulsel yang hilang pada tahun 2020 hanya sebesar **Rp5,1 Triliun**. Angka ini lebih kecil jika dibandingkan dengan skema *social distancing* (Rp6,5 Triliun) dengan selisih **Rp1,4 Triliun**. Jika dilihat lebih spesifik, kebijakan karantina wilayah akan membuat pertumbuhan ekonomi Sulsel tahun 2020 pada kuartal II terjun bebas di angka 1,33 persen. Meskipun demikian, skema ini memungkinkan terjadinya rebound secara cepat di kuartal III ke angka 6,43 persen. Hal ini berbeda dengan skema *social distancing* yang menunjukkan konsistensi penurunan selama tahun 2020 (I-IV).

Selanjutnya, berdasarkan data Susenas (2017), dilaporkan bahwa jumlah rumah tangga (RT) Sulsel yaitu sebesar 2.075.093, dengan jumlah individu 4-5 orang per RT. Jika diasumsikan bahwa kebijakan *cash transfer* hanya diperuntukkan pada kelompok RT dengan kondisi sosial ekonomi 40 persen terbawah (809.203 RT), maka pemerintah daerah Sulsel membutuhkan dana sekitar Rp1,5 Triliun<sup>[1]</sup> untuk menalangi total pengeluaran kelompok RT tersebut per bulan. Alternatifnya, pemerintah daerah Sulsel dapat berfokus pada total pengeluaran makanan saja dengan biaya sekitar Rp909 Milyar<sup>[2]</sup> per bulan.

Dengan demikian, hasil kajian yang dilakukan menunjukkan bahwa peluang ekonomi Sulsel 2020 yang hilang dari karantina wilayah diproyeksikan lebih rendah dibandingkan pendekatan *social distancing*. Namun, terdapat beberapa catatan penting: 1) Jika menjadi pilihan, kebijakan ini harus diambil secara cepat dan tepat; 2) Penerapan karantina wilayah harus dipersiapkan dengan baik. Khususnya terkait ketersediaan bahan pokok bagi pemenuhan kebutuhan RT yang menjadi fokus pemerintah; 3) Pentingnya memastikan upaya penanganan kesehatan kepada pasien COVID-19 selama masa karantina tetap berjalan secara efektif.

[1] Rata-rata total pengeluaran RT 40% Terbawah per Individu per Bulan: Rp397.824.

[2] Rata-rata total pengeluaran makanan RT 40% Terbawah per Individu per Bulan: Rp241.146.